

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Pratiwi Rahmamilania Husein

Prnia20@gmail.com

Pembimbing: Dr. Febri Yuliani, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widayam Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simp Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-632777

Abstract

This study aims to determine the strengthening of food security towards food independence in Pekanbaru City and to determine the factors that influence in strengthening food security towards food independence in Pekanbaru City. This research is a study that uses a qualitative methodology. This research is descriptive, describing the reality correctly regarding strengthening food security towards food independence in Pekanbaru City. The results of this study are strengthening food security towards food self-sufficiency in Pekanbaru City carried out by optimizing the yard of the house by the Women Farmers Group (WFG), optimizing idle land by the Farmer Group (FG), providing seeds and fertilizer assistance to WFG and FG. Also institutional and community empowerment, monitoring information on basic food prices. Encouraging non-rice local food processing into processed food products while still paying attention to safety and nutritional quality, planting corn with women farmer groups.

Keywords : *Strengthening, food security, food independence*

PENDAHULUAN

Prioritas pembangunan nasional adalah peningkatan ketahanan pangan yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai karakteristik daerah (Ediwiwati, 2015:2). Ketahanan pangan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat hidup sehat dan beraktivitas. Pentingnya pangan menyangkut kesejahteraan hidup masyarakat dan negara, Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak dan sebuah negara tidak bisa berkembang. Pentingnya pangan sebagai pemenuhan gizi dan nutrisi masyarakat merupakan salah satu fungsi utamanya. Fungsi ketersediaan pangan bagi masyarakat merupakan fungsi primer atau utama. Dengan adanya pangan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun jika tanpa pangan, masyarakat tidak dapat hidup secara sehat, beraktivitas normal, dan bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketahanan pangan sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan. Pangan merupakan urusan wajib di pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan maka di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan maka yang menjadi unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada setiap tahun semakin meningkat. Untuk itu ketahanan pangan bagi penduduk Kota

Pekanbaru sangat perlu dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Jumlah penduduk yang semakin bertambah harus dapat diimbangi dengan ketersediaan pangan yang cukup bagi penduduknya. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru dari periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat diketahui pada tabel 1. Berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Periode Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2016	1.064.566 jiwa
2	2017	1.091.090 jiwa
3	2018	1.117.360 jiwa

Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2019.

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebanyak 1.064.566 jiwa. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 1.091.090 jiwa. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 1.117.360 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Pekanbaru tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan.

Ketersediaan pangan Provinsi Riau selama periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2018 dapat diketahui pada tabel 2. Berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Ketersediaan Pangan Provinsi Riau Periode Tahun 2016-2018

No	Jenis Pangan	2016 (Ton)	2017 (Ton)	2018 (Ton)
1	Beras	839.771	843.661	805.062
2	Jagung	32.850	30.768	25.723
3	Kedelai	2.654	1.119	6.283
4	Kc. Tanah	913	798	1.058
5	Kc. Hijau	650	448	434
6	Ubi Jalar	4.904	4.802	3.780
7	Ubi Kayu	105.992	124.509	133.738
8	Sagu	326.755	339.007	339.007
9	Buah-buahan	195.760	243.962	310.088
10	Sayuran	104.523	129.380	44.964
1	Daging	65.800	70.909	73.170
12	Telur	6.273	6.453	6.711
13	Ikan	219.406	239.540	240.905

Sumber : Diskepang Riau, 2019.

Berdasarkan tabel 2. dapat diketahui bahwa ketersediaan pangan pada Provinsi Riau yang mengalami penurunan jumlah adalah beras, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan sayuran. Jenis-jenis pangan tersebut mengalami penurunan jumlah ketersediaannya sedangkan jumlah penduduk Provinsi Riau khususnya daerah Kota Pekanbaru semakin meningkat pada setiap tahunnya.

Terdapat beberapa permasalahan di dalam ketersediaan pangan di Kota Pekanbaru, yang antara lain adalah sebagai berikut (Rencana Kerja Diskepang Kota Pekanbaru, 2020):

1. Ketersediaan pangan didominasi dari pasokan luar daerah:

- a. Rendahnya kemampuan produksi pangan di kota Pekanbaru, sehingga ketersediaan pangan masih tergantung pada pasokan luar daerah
 - b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
 - c. Belum tersedianya data pasokan pangan sehingga sulit untuk menganalisa ketersediaan pangan yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program
 - d. Belum optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan karena komitmen dan implementasi kesepakatan belum dilaksanakan sepenuhnya
 - e. Pembinaan dan pemberdayaan ketahanan pangan pada kawasan rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan
2. Distribusi dan akses pangan:
- a. Belum tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan di kota Pekanbaru
 - b. Tingginya fluktuasi harga dan pasokan pangan
3. Penganekaragaman dan pola konsumsi pangan masih rendah:
- a. Keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga
 - b. Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi
 - c. Adanya kecendrungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
 - d. Lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima

- e. Adanya pengaruh nilai budaya kebiasaan makanan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
 4. Pengawasan keamanan pangan belum optimal:
 - a. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan terutama pada produk pangan segar
 - b. Belum dipahami dan diterapkannya cara – cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar
 - c. Belum efektifnya koordinasi penanganan keamanan pangan, karena system yang dikembangkan, SDM dan pedoman masih terbatas
 - d. Belum adanya laboratorium yang telah terakreditasi
 - e. Standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar import belum jelas diterapkan, sehingga buah import yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke kota Pekanbaru
 - f. Belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan
 - g. Koordinasi lintas sektor dan sub sektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal
 5. Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan belum optimal sebagai aspek non teknis merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan, Kadar air yang erat kaitannya dengan aktivitas air akan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan sehingga akan berpengaruh pada kualitas bahan pangan (Herawati, 2018:21) :
 - a. Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah terhadap kelembagaan ketahanan pangan sebagai unit kerja daerah dan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga koordinatif dalam penanganan ketahanan pangan di daerah
 - b. Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih kurang dalam gerak pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan
 - c. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan agar berkelanjutan
 - d. Penyediaan hasil analisis, peta ketahanan pangan serta hasil kajian ketahanan pangan yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodik
 - e. Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
 6. Kurangnya dukungan administrasi dan manajemen. Pada dasarnya sistem administrasi dan manajemen di Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru berjalan dengan baik. Dukungan pemerintah Kota Pekanbaru untuk berbagai program dan kegiatan belum optimal. Hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam mendukung program kegiatan prioritas yang diusulkan. Sehingga target yang ditetapkan tidak dapat tercapai pada tahun tersebut dan berakibat kinerja Dinas Ketahanan Pangan menurun.
- Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan kebijakan di dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan. Pada Pasal 7 dapat diketahui upaya Pemerintah Kota Pekanbaru di dalam memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat Kota

Pekanbaru dengan membentuk kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Kelompok kerja tersebut bertugas dalam menghimpun, mengolah, dan menyajikan bahan perumusan kebijakan pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, mutu, gizi dan keamanan pangan. Hal ini tertuang dalam rencana kerja tahun 2021 Diskepang Kota Pekanbaru di dalam rencana program ketahanan pangan, yaitu:

1. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung ketahanan pangan sesuai kewenangan daerah
2. Penyediaan infrastruktur lumbung pangan
3. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik

Rawan pangan memiliki definisi yang mana daerah, masyarakat atau rumah tangga tidak bisa mencukupi kebutuhan akan pangannya dalam memenuhi kebutuhan fisiologis pertumbuhan serta kesehatan. Rawan pangan (food insecurity) adalah kondisi yang mana masyarakat tidak dapat mengakses serta memenuhi kebutuhan pangannya hingga mengakibatkan turunya kualitas hidup masyarakat (Purwantini, 2014:4). Implementasi dari kebijakan tersebut yang terealisasi adalah kegiatan stimulus bantuan untuk aktualisasi pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal untuk pengembangan ketersediaan pangan yang beraneka ragam setiap rumah tangga dalam suatu kawasan. Objek penerima manfaat adalah Kelompok Wanita Tani (KWT). Kemudian pemberian bibit tanaman, infrastruktur dan belanja pendukung kegiatan penumbuhan terhadap Kelompok Tani (KT). Objek penerima manfaat adalah kelompok tani. Jumlah objek penerima manfaat dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat diketahui pada tabel 3. Berikut:

Tabel 3. Jumlah Objek Penerima Manfaat Periode Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah KWT	Jumlah KT
1	2015	10 kelompok	3 kelompok
2	2016	10 kelompok	-
3	2017	13 kelompok	10 kelompok
4	2018	15 kelompok	8 kelompok
5	2019	9 kelompok	5 kelompok

Sumber: Diskepang Pekanbaru, 2020.

Berdasarkan tabel 3. tersebut dapat diketahui bahwa penerima manfaat dari realisasi kegiatan yang merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Tani. Namun, jumlah objek penerima manfaat mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah objek penerima manfaat mengalami penurunan. Penurunan jumlah objek penerima manfaat tentu berdampak pada jumlah keterlaksanaan kegiatan.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah memiliki kebijakan dalam ketahanan pangan untuk daerahnya. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih belum optimal. Hal ini dapat diketahui dari jumlah ketersediaan pangan yang semakin menurun tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru”. tujuan penelitian yang

hendak dicapai adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kota Pekanbaru dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru merupakan suatu studi yang menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, mendeskripsikan kenyataan secara benar mengenai Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No. 1 Pekanbaru. Untuk teknik pemilihan informan (subjek penelitian), penulis menggunakan sampling purposif (purposive sampling). Dalam Kriyantono (2011:35) dinyatakan bahwa teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset yaitu Sekretaris Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Staff Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Masyarakat kota Pekanbaru yang rentan pangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi (Ruslan, 2010:56). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis data yang dipopulerkan oleh Huberman dan Miles, yaitu model analisis data interaktif yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Moleong, 2011:31).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan (Agustino, 2016:17). Menurut Easton bahwa kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Aktor mempunyai posisi yang amat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. Interaksi aktor dan lembaga inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas (Madani, 2011:36).

Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut (Marzali, 2012:20).

Menurut Chandler dan Plano bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan (Pasolong, 2013:38)

Pangan telah dikelompokkan menurut berbagai cara yang berbeda dan

berikut merupakan salah satu cara pengelompokannya, yakni (Karsin, 2014: 43): Padi-padian, Akar-akaran, umbi-umbian dan pangan berpati, Kacang-kacangan dan biji-bijian berminyak, Sayur-sayuran, Buah-buahan, Pangan hewani, Lemak dan minyak, Gula dan sirup.

Beberapa indikator yang digunakan dalam menentukan suatu wilayah masuk dalam kategori rawan pangan atau tidak yaitu (Yuliandarmaji, 2014:71):

1. Pendidikan, dilihat dari tingkat pendidikan dan jumlah tingkat buta huruf.
2. Tenaga kerja, dilihat dari tingkat penduduk yang tak bekerja serta penduduk yang berada dibawah pendapatan per kapita atau biasa dikatakan penduduk miskin.
3. Kesehatan, dilihat dari jumlah tenaga kesehatan, tingkat harapan hidup jumlah balita kurang gizi serta tingkat kematian ibu melahirkan.
4. Kehutanan, dilihat dari degradasi lahan rawan banjir atau kekeringan.
5. Prasarana fisik, dilihat dari akses air bersih dan akses listrik.

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru

1. Tujuan atau Sasaran

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan (Pasolong, 2013:38).

Salah satu kebijakan publik pemerintah daerah Kota Pekanbaru yaitu kebijakan yang terkait dengan pangan. Pangan merupakan urusan wajib di

pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kebijakan pemerintah daerah Kota Pekanbaru terkait dengan ketahanan pangan adalah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan maka yang menjadi unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

Tujuan atau sasaran dari kebijakan ketahanan pangan di Kota Pekanbaru adalah untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup dari segi jumlah, mutu, keamanan dan keragaman sehingga setiap rumah tangga mampu mengkonsumsi pangan dalam setiap saat, mampu mengkonsumsi pangan yang cukup, aman birgizi dan sesuai pilihannya untuk hidup sehat dan produktif. Pangan merupakan suatu hal yang sangat penting oleh karena itu pemerintah daerah Kota Pekanbaru harus memprioritaskan pembangunan ketahanan pangan dan pencapaiannya diposisikan sebagai pondasi bagi pembangunan sektor- sektor lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru bahwa: “Pemerintah daerah Kota Pekanbaru harus dapat melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan dalam kebutuhan dasar warganya, maka daerah tersebut akan menjadi sangat tergantung pada daerah lain dalam jangka waktu panjang”.

Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi sangat penting. Agar kebutuhan pangan masyarakat Kota Pekanbaru bisa

tercapai. Namun, masih terdapat masyarakat miskin di Kota Pekanbaru yang kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat diketahui pada Tabel 4. Berikut:

Tahun	Jumlah penduduk miskin	Persentase (%)
2015	33.760	3,27
2016	32.490	3,07
2017	33.090	3,05
2018	31.620	2,85
2019	28.600	2,52

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan Tabel 4. dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat di Kota Pekanbaru yang masih berada di garis kemiskinan dan sulit untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan beberapa usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakatnya.

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahhab, 2015:63). Salah satunya adalah dengan cara mewujudkan ketahanan pangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dalam pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak asasi manusia masyarakat Kota Pekanbaru. Ketahanan pangan juga merupakan bagian hal terpenting dari ketahanan nasional. World Bank mendefinisikan ketahanan pangan (food security) sebagai akses terhadap kecukupan pangan bagi semua orang pada setiap saat untuk memperoleh tubuh yang sehat dan kehidupan yang aktif. Ketahanan pangan mencakup produksi dan ketersediaan pangan; distribusi dan keterjangkauan oleh semua orang; konsumsi individual untuk memenuhi kebutuhan gizi; dan monitor kekurangan pangan (food insecurity). Ketahanan pangan merupakan alat untuk mewujudkan penerapan hak asasi terhadap kecukupan pangan (Alfia, 2016:52).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kota Pekanbaru bahwa:

“Kalau untuk saya pribadi untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga saya dengan harga yang terjangkau masih cukup sulit. Harga-harga barang kebutuhan pokok masih banyak harganya yang sering naik misalnya seperti harga cabe, bawang, telur ayam itu masih tinggi. Jadi menurut saya sasaran ketahanan pangan masih belum menjangkau kami”.

Suatu sasaran akan tercapai apabila seluruh masyarakat Kota Pekanbaru merasakan bahwa kebutuhan pangan tidak sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat. Namun, masih terdapat masyarakat kota Pekanbaru yang mengeluhkan masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang disebabkan karena harga yang naik. Harga pangan menentukan daya beli masyarakat terhadap pangan, dan terdapat hubungan negatif antara keduanya. Harga yang meningkat (pada pendapatan tetap), maka daya beli menurun, dan sebaliknya apabila harga turun. Dengan

demikian stabilitas harga pangan sangat penting untuk menjamin bahwa masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pangannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai pada penguatan ketahanan pangan di Kota Pekanbaru.

2. Aktivitas

Menurut teori implementasi kebijakan George Edward bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu (Winarno, 2012:110): Komunikasi, Sumber – sumber, kecenderungan, dan struktur birokrasi. Implementasi dari kebijakan ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru berupa kegiatan stimulus bantuan untuk aktualisasi pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal untuk pengembangan ketersediaan pangan yang beraneka ragam setiap rumah tangga dalam suatu kawasan. Ketahanan pangan rumah tangga individu sangat ditentukan pula oleh akses untuk mendapat pangan tersebut. Dalam hal ini tingkat pendapatan dan daya beli merupakan faktor penentu akses rumah tangga terhadap pangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru bahwa:

“Kegiatan atau program yang dilaksanakan dalam rangka ketahanan pangan di Kota Pekanbaru berupa pemberian bantuan untuk aktualisasi pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal untuk pengembangan ketersediaan pangan yang beraneka ragam setiap rumah tangga dengan objek penerima manfaat adalah Kelompok Wanita Tani. Juga kegiatan pemberian bibit tanaman, infrastruktur dan belanja pendukung kegiatan penumbuhan pada Kelompok Tani”.

Penerima manfaat dari realisasi kegiatan yang merupakan implementasi dari kebijakan ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Tani. Namun, jumlah objek penerima manfaat ini mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah objek penerima manfaat mengalami penurunan. Penurunan jumlah objek penerima manfaat tentu berdampak pada jumlah keterlaksanaan kegiatan/program penguatan ketahanan pangan Kota Pekanbaru.

Semakin banyak jumlah penerima objek manfaat tentu semakin banyak pula terlaksananya kegiatan atau program ketahanan pangan di Kota Pekanbaru. Namun, pada tahun 2019 mengalami penurunan yang disebabkan karena berkurangnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Tani. Optimalisasi dari fungsi Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Tani dapat membantu program penguatan ketahanan pangan di Kota Pekanbaru.

Agar penggarapan lahan tidur menjadi optimal maka diperlukan kerjasama dan kekompakan dalam manajemen kelompok tani dan juga keterlibatan masyarakat Kota Pekanbaru. Peran serta masyarakat juga sangat penting dilibatkan dalam penguatan ketahanan pangan ini. Aktivitas dari implementasi kebijakan penguatan ketahanan pangan di Kota Pekanbaru sebaiknya mencakup konsep ketahanan pangan yang meliputi:

1. Ketersediaan pangan: kecukupan jumlah pangan (food sufficiency).

Pemerintah daerah Kota Pekanbaru berkewajiban di dalam menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Pada dasarnya setiap masyarakat Kota Pekanbaru berhak atas pangan bagi

keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru harus diupayakan melalui produksi pangan dalam daerah yang mana produksi ini harus senantiasa meningkat dari tahun ke tahun.

2. Keamanan pangan (food safety)

Keamanan pangan adalah pangan yang bebas dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keadaan manusia, serta terjamin mutunya (food quality) yaitu memenuhi kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.

3. Kemerataan pangan

Kemerataan pangan mencakup pada sistem distribusi pangan yang mendukung tersedianya pangan setiap saat dan merata.

4. Keterjangkauan pangan

Keterjangkauan pangan mencakup pada kemudahan rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kota Pekanbaru ternyata masih terdapat juga masyarakat yang masih belum merasakan pemerataan pangan dan keterjangkauan pangan. Distribusi pangan yang tidak merata dapat menyebabkan harga pangan menjadi naik. Harga bahan pangan naik tentu sulit dijangkau bagi masyarakat yang kurang mampu sulit untuk membeli bahan pangan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Setiap instansi pemerintahan memiliki SOP kerja masing-masing yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kejelasan fungsi dan tugas pokok masing-masing instansi agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam melaksanakan kebijakan ketahanan pangan ini. Setiap stakeholder dapat bekerja sama dengan baik yang dimulai dengan berbagi informasi secara aktif antar instansi kemudian dapat melakukan dialog secara

aktif dan efektif di dalam mengkaji program-program penguatan ketahanan pangan, sehingga akan diperoleh suatu hasil yang dapat dilakukan refleksi untuk perbaikan ke depannya.

3. Hasil

Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi masyarakat Kota Pekanbaru sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru. Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu masyarakat Kota Pekanbaru. Dengan demikian ketahanan pangan mencakup tingkat rumah tangga dan tingkat nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru bahwa:

“Hasil dari implementasi kebijakan penguatan ketahanan pangan berupa kegiatan atau program-program yang dilaksanakan oleh Diskepan Pekanbaru di dalam mengatasi ketersediaan pangan, akses pangan dan konsumsi pangan bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Seperti aktualisasi pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal untuk pengembangan ketersediaan pangan yang beraneka ragam setiap rumah tangga dalam suatu kawasan. Masalah ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Masalah ketahanan merupakan salah satu masalah yang cukup serius. Sebab kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan. Oleh sebab itu, ketahanan pangan mutlak untuk

diwujudkan. Ketahanan pangan yang kuat akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang kuat pula”.

Salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan dapat diperoleh dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan yang berasal dari beras diperoleh dari hasil produksi padi. Petani mengelola hasil panen dengan cara yang berbeda-beda antar suatu daerah dengan daerah lainnya.

Kota Pekanbaru masih belum mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakatnya melalui swasembada. Masalah pangan beras ini pemerintah Kota Pekanbaru masih terus bergantung pada daerah lain. Penyebab Kota Pekanbaru masih belum mampu di dalam swasembada beras adalah persoalan alih fungsi lahan yang sebelumnya terjadi dalam jumlah yang luas. Terdapat banyak lahan persawahan di Riau khususnya di Kota Pekanbaru telah berubah menjadi perkebunan sawit.

Saat ini keberadaan lumbung pangan juga semakin terpinggirkan, padahal manfaat yang diharapkan dari lumbung pangan sebagai penyimpanan cadangan pangan juga dapat sebagai pengendali harga saat kelebihan produksi. Lumbung pangan dapat berperan sebagai cadangan pangan terutama di kawasan pedesaan. Selain itu, lumbung pangan tidak hanya efektif dalam melayani kebutuhan pangan rumah tangga anggotanya pada saat krisis tetapi juga melayani kebutuhan finansial rumah tangga anggotanya dari hasil pengelolaan lumbung.

Ketahanan pangan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Ketersediaan pangan pokok rumah tangga dapat digunakan sebagai acuan banyaknya

jumlah pangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Upaya memenuhi ketersediaan pangan pokok rumah tangga dapat berupa input yang meliputi produksi usaha tani, pembelian, pemberian dari pihak lain, raskin, dan peminjaman dari lumbung dikurangi dengan output usaha tani yang dijual, aktivitas sosial, aktivitas agama, iuran lumbung dan pangan yang diberikan kepada pihak lain.

Di dalam penguatan ketahanan pangan juga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Suatu langkah antisipatif untuk menghindari terjadinya masalah pangan (kelebihan/kekurangan pangan dan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan). Juga sangat diperlukan peran pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat melaksanakan kebijakan ketahanan pangan melalui pemberian informasi dan pendidikan, meningkatkan motivasi masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan. Peran serta masyarakat dalam ketahanan pangan dilakukan melalui kegiatan produksi, perdagangan dan distribusi pangan, serta cadangan pangan.

Diperlukan juga pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama dengan instansi/lembaga/perusahaan lainnya. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan/ pelatihan di bidang pangan, penyebarluasan ilmu dan teknologi di bidang pangan, serta penyuluhan pangan. Kerjasama dapat dilakukan dengan meliputi bidang produksi, perdagangan dan distribusi pangan; cadangan pangan; pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; serta riset dan teknologi pangan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan berhubungan dengan terpenuhinya pangan secara fisik dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan pada daerah tertentu. Kondisi yang mana pangan tidak terpenuhi merupakan kondisi rawan pangan. Ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi yang cukup, aman, bermutu hingga memiliki gizi yang berimbang pada suatu wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru bahwa:

“Terdapat beberapa faktor mempengaruhi ketahanan pangan di Kota Pekanbaru yang antara lain adalah ketersediaan pangan, akses pangan dan konsumsi pangan. Ketersediaan pangan ini mencakupi produksi, cadangan pangan, pasokan pangan dari luar dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini disesuaikan dengan jumlah masyarakat Kota Pekanbaru”.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru tinggi sehingga diperlukan juga ketersediaan pangan yang tinggi pula. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun mengalami penambahan jumlah yang cukup tinggi oleh karena itu harus diiringi dengan jumlah ketersediaan pangan yang cukup bagi warga Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru bahwa

“Pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung dan pertumbuhan penduduk bagaikan deret ukur. Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru positif, apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan, maka akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan penduduk Kota Pekanbaru di masa datang.

Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya”.

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebanyak 1.064.566 jiwa. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 1.091.090 jiwa. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 1.117.360 jiwa. Namun, meningkatnya jumlah penduduk Kota Pekanbaru tidak diimbangi dengan peningkatan ketersediaan pangan. Khususnya pada kebutuhan bahan pokok pangan beras, jagung, kedelai, ubi kayu dan sayuran yang mengalami penurunan jumlah ketersediaannya yang tidak sebanding dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk kota Pekanbaru.

Ketersediaan pangan di Kota Pekanbaru sangat diperlukan guna menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan bagi masyarakatnya. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru harus berupaya mencapai swasembada dan mempertahankan swasembada berkelanjutan bagi komoditas pangan strategis melalui sinergi dan keterpaduan antar sektor sehingga tujuan pembangunan ketahanan pangan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Ketersediaan pangan dapat dilakukan dengan pengembangan sistem produk prasarana produksi pangan dan mempertahankan lahan produktif. Untuk cadangan pangan nasional dapat berasal dari cadangan pangan masyarakat dan cadangan pemerintah. Cadangan pangan masyarakat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan atau perorangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bidang Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru bahwa:

“Di dalam memenuhi ketersediaan pangan diperlukan kerjasama antar stakeholder yang berada dalam naungan pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam kerjasama antar stakeholder ini adalah Adanya tumpang tindih tugas pokok antar departemen/instansi pemerintah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah pangan”.

Adanya tumpang tindih tugas pokok antar departemen/instansi pemerintah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah pangan. Juga di dalam pembuatan program ketahanan pangan, pemerintah daerah bersifat pragmatis, sehingga jenis program yang diterapkan kurang sesuai dengan konsep ketahanan pangan (mencakup dimensi sasaran, waktu dan sosial-ekonomi). Diperlukan pemilahan program ketahanan pangan yang lebih detail.

2. Akses Pangan

Akses terhadap pangan berhubungan dengan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, kondisi yang mana tidak dapat membeli atau memperoleh pangan disebut dengan kondisi rawan daya beli. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, sedang ketahanan pangan adalah jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif. Penurunan pasokan pangan berdampak pada harga pangan di pasar menjadi semakin melambung. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan pangannya khususnya masyarakat yang kurang mampu sehingga masyarakat yang kurang mampu harus membayar mahal untuk membeli kebutuhan pangannya. Adanya gejolak harga pangan berdampak negatif terhadap daya beli konsumen dan menghambat rumah tangga

untuk akses terhadap pangan yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru bahwa:

“Salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah akses pangan. Akses pangan yang baik sangat diperlukan guna menjamin ketersediaan pangan di Kota Pekanbaru bagi warganya dalam kondisi yang cukup, memadai dan dikelola dengan baik ditandai dengan stabilitas harga pangan yang terjangkau bagi konsumen namun disisi lain juga memberikan penghasilan yang memadai bagi petani”.

Ketahanan pangan selalu dikaitkan dengan stabilitas harga pangan khususnya beras, atau pangan pokok utama. Cukup tidaknya persediaan pangan di pasar berpengaruh pada harga pangan. Kenaikan harga pangan bagi keluarga yang tidak bekerja atau yang bekerja tetapi penghasilannya tidak cukup, dapat mengancam kebutuhan gizinya yang berarti ketahanan pangan keluarganya terancam. Sebaliknya, persediaan cukup, harga stabil tetapi banyak penduduk tanpa kerja dan tanpa pendapatan, berarti tanpa daya beli, juga menyebabkan persediaan pangan itu tidak efektif.

Akses pangan merupakan kemudahan sebuah rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Akses pangan meliputi dua hal, yaitu akses secara fisik dan akses ekonomi. Akses pangan secara fisik ialah kemampuan dalam menjangkau pangan yang berhubungan dengan tempat atau lokasi mendapatkan pangan, sedangkan akses ekonomi adalah kemampuan dalam mendapatkan pangan yang berkaitan dengan penghasilan. Pengaruh penghasilan terhadap akses pangan dapat dilihat dari pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan bahan

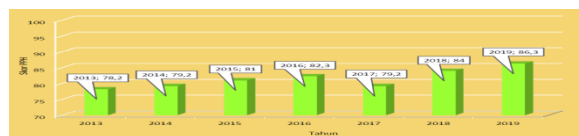
pangan. Pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan berbanding terbalik dengan akses pangan. Apabila rumah tangga untuk kebutuhan bahan pangan sangat besar berarti akses pangan atau akses untuk mendapatkan pangan sangat sulit dan begitupun sebaliknya.

3. Konsumsi Pangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru bahwa:

“Faktor lainnya yang mempengaruhi penguatan ketahanan pangan adalah konsumsi pangan. Konsumsi pangan ini mencakup kecukupan energy, kecukupan gizi, diservikasi pangan dan keamanan pangan. Untuk kualitas konsumsi pangan bagi penduduk Kota Pekanbaru ini mengalami fluktuatif dan pernah mengalami penurunan pada tahun 2017”.

Perkembangan kualitas pangan penduduk Kota Pekanbaru dapat diketahui pada gambar 1. berikut:



Gambar 1. Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk Kota Pekanbaru

Berdasarkan gambar 1. dapat diketahui bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk Kota Pekanbaru mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor PPH (Pola Pangan Harapan) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Penurunan kualitas konsumsi pangan penduduk Kota Pekanbaru terjadi pada tahun 2017 dengan skor PPH 79.2.

Kegiatan analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk merupakan suatu kesatuan dari rangkaian kegiatan untuk mengetahui situasi konsumsi pangan

penduduk dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap masyarakat dalam rangka mewujudkan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Definisi konsumsi energi per kapita per hari adalah nilai pangan yang dikonsumsi per kapita tiap hari dengan satuan kkal. Definisi PPH Konsumsi adalah proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Jumlah skor PPH Konsumsi maksimal 100.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui pencapaian skor PPH. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Untuk mencapai konsumsi energi dan PPH yang ideal perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya. Meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat.

Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan. Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Di dalam penguatan ketahanan pangan perlu dilakukan penganekaragaman pangan. Konsumsi pangan yang beraneka ragam dengan prinsip gizi yang seimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan program

optimalisasi pekarangan rumah oleh Kelompok Wanita Tani (KWT), optimalisasi lahan tidur oleh Kelompok Tani (KT), pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada KWT dan KT. Juga pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat, pemantauan informasi harga pangan pokok. Mendorong olahan-olahan pangan lokal non beras menjadi produk-produk olahan pangan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kualitas gizinya, melakukan penanaman jagung bersama kelompok wanita tani Akses terhadap pangan berhubungan dengan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, Diperlukan perbaikan terhadap kualitas konsumsi pangan masyarakat, khususnya melalui penganeka ragam konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal termasuk meningkatkan aspek keamanan pangan. Kekayaan sumberdaya hayati yang perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat.

REFERENSI

- Alfia, Lutfi. 2016. Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. Vol 2 No. 3.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Ketahanan Pangan. 2016. *Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015*. Jakarta: Kementrian Pertanian.
- Ediwiayati, Retno. 2015. Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Oro Bulu Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan). *Jurnal AGRISE*. Volume XV No. 2
- Herawati, H. 2018. Potensi Hidrokoloid sebagai Bahan Tambahan pada Produk Pangan dan Non Pangan Bermutu. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Vol. 37 No. 1.
- Karsin, ES. 2014. *Klasifikasi Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penerbit Swadaya.
- Krisyantoro, Rachmat. 2011. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Madani, Muhlis. 2011. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Purwantini, Tri Bastuti. 2014. Pendekatan Rawan Pangan dan Gizi: Besaran, Karakteristik, dan Penyebabnya. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 32 No. 1
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahhab, Solichin Abdul. 2015. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yuliandarmaji, A. 2014. Analisis Spatio-Temporal Kriminalitas Kota Yogyakarta dengan Visualisasi Webgis Tahun 2011-2012. *Doctoral Dissertation*. Universitas Muhammadiyah Surakarta